



# ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

## Para Anggota Parlemen Berkumpul Untuk Mempromosikan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Perdagangan

JAKARTA, August 25, 2017 – Pemerintah-pemerintah, dalam perundingan rencana Kemitraan Ekonomi Komprehensif di Kawasan (Regional Comprehensive Economic Partnership “RCEP”), harus bisa memastikan pengikutsertaan klausa perlindungan hak asasi manusia (HAM). Itulah pesan yang disampaikan oleh para anggota parlemen dan para pemangku kepentingan lainnya yang berkumpul di Jakarta pekan ini untuk membahas kemitraan RCEP dan imbasnya terhadap berbagai warga negara di kawasan dalam sebuah dialog yang dilaksanakan selama dua hari oleh ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Konsorsium Extraterritorial Obligation (ETO).

Para anggota parlemen dari negara-negara yang terlibat dalam RCEP, para ahli dunia, para perwakilan masyarakat sipil, dan berbagai pejabat pemerintahan berkumpul dalam pertemuan tersebut guna membahas rangkaian perundingan yang kini tengah berjalan serta imbasnya terhadap HAM. Pada akhir dialog, para anggota parlemen meminta agar imbas dari perjanjian kemitraan tersebut terhadap HAM diberi perhatian lebih.

“Terdapat beberapa keprihatinan serius dalam RCEP, di mana pemerintah-pemerintah yang terlibat di dalam perundingan gagal membahas. Banyak ketentuan di dalamnya yang jika disepakati dalam bentuknya sekarang akan membawa dampak serius bagi hak-hak rakyat, khususnya di Asia Tenggara,” kata anggota parlemen Indonesia Mercy Barends yang juga merupakan anggota APHR.

“Membiarkan perjanjian ini tetap dilanjutkan tanpa mempertimbangkan secara serius dampaknya merupakan kesalahan yang fatal. Kami sangat menyarankan para negosiator RCEP untuk meminta pengikutsertaan sebuah mekanisme tentang pemeriksaan dampak HAM, guna memastikan kesepakatan kemitraan tersebut tidak berakhir lebih banyak ruginya daripada untungnya. Bila hal tersebut gagal dilakukan, seluruh rakyat di kawasan berisiko banyak dirugikan oleh para pelaku korporasi yang selama ini sudah memiliki rekam jejak buruk dalam upaya perlindungan HAM dan lingkungan.”

Para anggota parlemen meminta negosiasi yang selama ini dilakukan secara tertutup dari publik dan pemeriksaan parlemen agar dapat dilaksanakan dengan lebih transparan, serta menekankan kembali keprihatinan mereka terhadap isi dari bagian draf perjanjian yang bocor terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan rencana penyertaan mekanisme penyelesaian perselisihan antara penanam modal dan negara (investor-state dispute settlement “ISDS”).

“Rencana perlindungan HKI merupakan sebuah ancaman serius terhadap akses obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, akibat adanya konsep perpanjangan paten yang akan berdampak pada kenaikan harga. Akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk obat-obatan, adalah sebuah hak fundamental, dan pembatasannya merupakan bentuk

pelanggaran serius hak tersebut,” tutur anggota parlemen Malaysia Charles Santiago yang juga merupakan Ketua APhR. Santiago menambahkan, dalam perencanaan ISDS yang ada, kebijakan yang diambil oleh berbagai parlemen di tingkat nasional dapat dibatalkan oleh pengadilan-pengadilan internasional yang tidak memiliki pengawasan langsung terhadap publik.

“Di bawah tekanan beberapa negara maju yang juga merupakan anggota perundingan, kemitraan RCEP semakin meminta pengikutsertaan bagian-bagian dari Kemitraan Antar Pasifik (Trans Pacific Partnership “TPP”) yang kaku dan pro-korporasi. Memasukkan mekanisme Penyelesaian Perselisihan antara Penanam Modal dan Negara khususnya memprihatinkan bagi kami, disebabkan ancamannya yang unik bagi keadilan dan aturan hukum. Mekanisme ini sangat keji, sebab ia menguntungkan kepentingan bisnis yang menjadi ancaman serius bagi hukum dan kedaulatan negara, dengan mengorbankan kepentingan komunitas dan golongan yang terdampak. Kami menolak dengan keras hal tersebut untuk diterapkan di dalam RCEP,” ujar Santiago.

Para legislator berkumpul dari berbagai negara di kawasan dan meminta adanya tindakan cepat guna mengadvokasi, baik di dalam negeri maupun di kawasan, penolakan terhadap pengikutsertaan ketentuan-ketentuan problematis ini serta menekan para perunding untuk memberikan akses pengawasan terhadap rencana kemitraan tersebut dari perspektif HAM.

Dalam bentuknya saat ini, RCEP tidak ada bedanya dengan perjanjian perdagangan bebas lain yang kerap membahayakan perlindungan HAM dan lingkungan. Kami membutuhkan pemerintah-pemerintah, para anggota parlemen, dan masyarakat, termasuk kalangan bisnis, untuk maju dan menuntut kepentingan publik di atas kepentingan korporasi global. Paling tidak, kita harus membuka proses negosiasi untuk dibuka ke publik dan parlemen. Kita bisa meminta seluruh pemerintahan kita untuk melakukan analisis untung-rugi dari draf RCEP final yang akan diperlihatkan ke publik sebelum ada penandatanganan persetujuan apapun,” ujar anggota parlemen Filipina, Tomasito Villarin.